

PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BONTANG MANGROVE PARK DI KOTA BONTANG

Anisa Dzima ¹, Awintiani¹, Martinus Nanang²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh pengelolaan dan pengembangan Bontang Mangrove Park (BMP) sebagai kawasan ekowisata yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada peran para pemangku kepentingan (stakeholder), bentuk keterlibatan mereka, serta dampak yang dihasilkan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BMP tidak lepas dari sinergi antara berbagai pihak, di antaranya pemerintah daerah, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Masing-masing pihak memiliki kontribusi yang beragam, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, promosi pariwisata berbasis konservasi, hingga perlindungan kawasan mangrove dari kerusakan lingkungan. Bentuk keterlibatan ini tidak hanya menciptakan sistem pengelolaan yang partisipatif, tetapi juga mendorong munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian ekosistem mangrove. Secara sosial, pengelolaan BMP berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dan pengetahuan lingkungan; secara ekonomi, terbuka peluang usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar; dan secara ekologis, keberlanjutan kawasan mangrove dapat terjaga dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi lintas sektor dan perumusan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat sebagai upaya menjaga keberlanjutan kawasan ekowisata di masa mendatang.

Kata Kunci: *Bontang Mangrove Park, pengelolaan kolaboratif, stakeholder, ekowisata berkelanjutan, dampak sosial-ekonomi-ekologi*

Pendahuluan

Pariwisata merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk berbagai tujuan, seperti rekreasi, pendidikan, atau bahkan

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nisa.da24@gmail.com

² Dosen Pembimbing Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

penelitian. Kegiatan ini tidak hanya memberi pengalaman bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Inati (2022) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan individu dalam memanfaatkan waktu luang yang dimiliki. Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata yang dilakukan secara tepat dapat menjadi sarana untuk menggerakkan sektor ekonomi lokal serta memperkuat identitas budaya dan pelestarian lingkungan.

Salah satu bentuk pariwisata yang semakin mendapat perhatian adalah ekowisata, yaitu kegiatan wisata yang mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Ekowisata menjadi upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat sekitar. Menurut Ariani dan Hayati (2020), ekowisata memiliki tujuan untuk mendukung pelestarian alam, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendongkrak perekonomian lokal melalui pengelolaan wisata berbasis konservasi.

Di Indonesia, kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) di Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, budidaya, hingga pariwisata. Salah satu objek wisata yang dikembangkan di wilayah ini adalah Bontang Mangrove Park (BMP), yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang. Kawasan ini sebelumnya merupakan lahan kosong dan tidak terawat, namun sejak tahun 2017 mulai dirancang oleh Balai Taman Nasional Kutai dengan dukungan Pemerintah Kota Bontang. Setahun kemudian, pada tahun 2018, Bontang Mangrove Park diresmikan dengan konsep wisata edukatif dan konservatif yang berfokus pada pelestarian mangrove.

Keberadaan Bontang Mangrove Park memberi dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan. Data dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang menunjukkan adanya peningkatan jumlah wisatawan domestik dari 133.753 jiwa pada tahun 2021 menjadi 219.298 jiwa pada tahun 2022. Sementara itu, wisatawan mancanegara mulai tercatat kembali pada tahun 2022 dengan jumlah 21 orang setelah dua tahun sebelumnya nihil akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, tren kunjungan kembali menurun sejak 2023, yang diduga disebabkan oleh sejumlah tantangan dalam pengelolaan kawasan.

Pengembangan ekowisata tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat lokal, hingga pelaku usaha wisata. Kolaborasi dan sinergi antar pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran serta para stakeholder dalam pengembangan Bontang Mangrove Park, serta bagaimana bentuk

kemitraan yang terjalin dapat berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Strategi dan Pengembangan

Strategi dalam konteks pengembangan dimaknai sebagai suatu rencana tindakan yang berfokus pada tiga hal penting, yaitu siapa yang menjadi sasaran, apa yang ditawarkan, dan bagaimana cara mencapainya. Meskipun tidak disebutkan sumber secara langsung, pemahaman ini merujuk pada pendekatan strategi manajemen secara umum yang sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan pariwisata. Sementara itu, pengembangan dijelaskan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kinerja melalui pemberian informasi dan peningkatan keterampilan (Hafsah, 2004). Oleh karena itu, strategi pengembangan mencakup proses analisis terhadap lingkungan internal, seperti kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal, seperti peluang dan ancaman. Analisis ini digunakan untuk merumuskan langkah-langkah atau alternatif pengembangan yang tepat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dalam suatu kegiatan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hetifah menjelaskan bahwa stakeholder bisa berupa individu maupun kelompok yang terlibat dan memberikan pengaruh, baik yang bersifat positif maupun negatif, terhadap jalannya pembangunan. Freeman memperkuat pengertian ini dengan menyatakan bahwa stakeholder adalah pihak yang dapat saling memengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Townsley, stakeholder terbagi menjadi dua kategori, yaitu stakeholder primer yang secara langsung terlibat dalam pemanfaatan sumber daya, dan stakeholder sekunder yang tidak terlibat langsung tetapi tetap bergantung pada hasil sumber daya tersebut. Lebih lanjut, Bryson menekankan bahwa penting untuk melakukan analisis stakeholder berdasarkan dua indikator utama, yakni tingkat kepentingan (interest) dan tingkat kekuasaan (power), agar bisa menentukan sejauh mana peran dan pengaruh masing-masing pihak dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Hidayah et al., 2019).

Kebijakan Pariwisata

Kebijakan pariwisata dijelaskan oleh Goeldner sebagai bentuk strategi yang disusun baik secara kolektif maupun individual dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata. Dalam penyusunannya, kebijakan ini harus mempertimbangkan kualitas pengalaman wisatawan serta dampak atau manfaat yang dirasakan oleh para stakeholder yang terlibat. Artinya,

kebijakan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar pembangunan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

Peran Stakeholder dalam Pariwisata

Dalam pembangunan sektor pariwisata, peran stakeholder sangatlah beragam dan saling melengkapi. Nugroho (2015) menguraikan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator, terutama dalam penyediaan infrastruktur pendukung, pelatihan sumber daya manusia, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal. Masyarakat setempat juga memiliki kontribusi penting, terutama dalam pengelolaan usaha wisata berbasis lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain, sektor swasta berperan sebagai penyedia layanan dan fasilitas wisata yang menunjang kenyamanan pengunjung. Media massa membantu menyebarkan informasi dan promosi destinasi wisata. Sementara itu, perencana dan peneliti bertugas menyusun strategi berdasarkan hasil riset akademik, dan wisatawan bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga menjadi agen penyebar nilai budaya dan pelestarian lingkungan.

Kemitraan (Partnership Theory)

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama. Sulistyani dalam Marsiatanti (2011) menjelaskan bahwa kemitraan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya kemitraan mutualistik yang saling menguntungkan, kemitraan semu (pseudo) yang kontribusinya tidak seimbang, serta kemitraan konjugasi yang bersifat sementara untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks pembangunan, kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta dikenal dengan istilah Public Private Partnership (PPP). Mahmudi (2007) menyatakan bahwa PPP merupakan bentuk kerja sama antara sektor publik dan sektor swasta atau BUMN/BUMD dalam melaksanakan proyek pembangunan. Amirullah dalam Irianti (2011) menambahkan bahwa melalui PPP, pihak swasta dapat diberikan kewenangan untuk mengelola proyek pembangunan. Savas dalam Irianti (2011) menggambarkan bahwa bentuk kemitraan ini sangat fleksibel, dengan spektrum kerja sama yang luas, mulai dari proyek yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah hingga yang sepenuhnya dijalankan oleh swasta.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami peran para stakeholder dalam pengembangan objek wisata Bontang Mangrove Park. Penelitian dilakukan di kawasan Bontang Mangrove Park, Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, yaitu informasi berbentuk kata-kata, tindakan, serta persepsi masyarakat (Moleong, 2021). Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen dan literatur yang relevan.

Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling (Sugiyono, 2011). Informan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung, seperti perwakilan pemerintah, pengelola kawasan, kelompok masyarakat, serta warga yang tinggal di sekitar lokasi penelitian.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi langsung terhadap fasilitas dan aktivitas wisata.
2. Wawancara, baik mendalam maupun semi terstruktur, dengan stakeholder utama dan masyarakat.
3. Dokumentasi, berupa foto dan dokumen pendukung, dengan izin dari pihak terkait.

Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Data dianalisis untuk melihat hubungan antara bentuk kerjasama para stakeholder dengan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi yang terjadi di lingkungan sekitar Bontang Mangrove Park.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Dari data yang terkumpul, ditemukan bahwa pengelolaan BMP tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara pihak Balai Taman Nasional Kutai (Balai TNK) sebagai pengelola utama kawasan konservasi, sejumlah perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam berbagai aktivitas harian kawasan wisata tersebut.

Identifikasi dan Peran Stakeholders

Dalam upaya mengembangkan Bontang Mangrove Park (BMP) sebagai objek wisata berbasis konservasi, berbagai pihak turut ambil bagian dengan peran dan kontribusi yang saling melengkapi. Tidak hanya melibatkan satu instansi atau kelompok, tetapi kerja sama ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang terencana dan terarah. Balai Taman Nasional Kutai (TNK), yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memegang peranan penting sebagai pengelola utama kawasan. Tugas mereka bukan hanya terbatas pada mengawasi pelestarian lingkungan, melainkan juga mengatur zonasi kawasan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang. Mereka juga bertanggung jawab dalam menjaga agar fungsi kawasan sebagai habitat alami tetap terjaga, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari kerusakan ekosistem akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali.

Selain peran pemerintah, sektor swasta juga menunjukkan kontribusi nyata dalam pengembangan kawasan ini. Sejumlah perusahaan besar yang

beroperasi di Bontang seperti PT Indominco, Pupuk Kaltim, Pertamina, Telkomsel, PLN, hingga RSUD Bontang, tergabung dalam forum Mitra TNK. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mereka menyumbangkan berbagai fasilitas pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan destinasi wisata. Beberapa di antaranya adalah pembangunan aula serbaguna untuk kegiatan edukatif dan sosial, pintu gerbang utama yang menjadi ikon kawasan, pos jaga untuk pengawasan keamanan, loket tiket, gazebo sebagai tempat beristirahat pengunjung, toilet umum yang layak, dan sarana lain yang memperkuat daya tarik kawasan. Kehadiran fasilitas-fasilitas ini membuat BMP lebih layak dikunjungi dan mendukung kenyamanan wisatawan.

Kontribusi dari sektor swasta ini juga menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Mereka melihat BMP sebagai aset bersama yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Tidak kalah penting, keterlibatan masyarakat lokal menjadi elemen kunci dalam keberlangsungan pengelolaan BMP. Kehadiran warga sekitar tidak hanya sebatas sebagai penonton, melainkan mereka terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas harian. Banyak warga yang menjadi pedagang, penjaga parkir, ataupun relawan kebersihan. Beberapa di antara mereka secara rutin mengikuti kerja bakti membersihkan kawasan dari sampah, menanam mangrove, serta membantu memberikan informasi dan edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Sebagai bentuk penghargaan atas peran aktif tersebut, beberapa warga bahkan diberikan akses masuk gratis ke BMP. Ini bukan hanya menjadi insentif, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap kawasan, yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk terus menjaga dan merawat BMP seperti milik mereka sendiri.

Keseluruhan keterlibatan ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata berbasis konservasi seperti Bontang Mangrove Park tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilan pengelolaan kawasan sangat dipengaruhi oleh kuatnya sinergi antar pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sebagai aktor lokal yang paling dekat dengan kawasan. Kolaborasi semacam ini menjadi fondasi penting dalam membangun pariwisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam aspek sosial dan ekologi.

Bentuk Keterlibatan

Hubungan kerja antara Balai Taman Nasional Kutai (Balai TNK) dan para mitra tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas fisik seperti gazebo, pos jaga, atau tempat istirahat bagi pengunjung. Lebih dari itu, mereka juga bersama-sama menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi penanaman mangrove secara rutin, penyuluhan kepada masyarakat, serta kegiatan edukatif yang

ditujukan kepada pelajar agar mereka tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya menjaga alam.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Mitra TNK tidak sekadar memberikan bantuan berupa dana atau fasilitas, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan. Mereka ikut serta dalam penanaman mangrove, memberikan pelatihan kepada warga sekitar agar dapat mengembangkan usaha secara mandiri, serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian mereka tidak hanya soal pembangunan fisik, tapi juga pada upaya jangka panjang untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan.

Masyarakat di sekitar kawasan Bontang Mangrove Park juga memegang peranan penting dalam pengelolaannya. Banyak warga yang membuka usaha kecil seperti warung makan, penjualan souvenir, atau penyewaan pelampung dan perahu untuk wisata air. Kegiatan-kegiatan ini telah menjadi sumber penghasilan baru bagi mereka, yang sebelumnya tidak memiliki banyak kesempatan dalam sektor pariwisata. Kini, mereka ikut merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan wisata tersebut.

Untuk mendukung peran warga, Balai TNK secara aktif memberikan pelatihan dan pendampingan, terutama bagi pelaku usaha kecil. Warga diberikan bimbingan tentang cara mengelola usaha dengan baik, mengatur keuangan, memberikan layanan yang ramah kepada pengunjung, dan menjaga kebersihan area wisata. Semua ini dilakukan agar partisipasi warga semakin terarah dan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keberlangsungan Bontang Mangrove Park secara keseluruhan.

Peran yang dijalankan oleh Balai TNK, perusahaan mitra, dan masyarakat ini saling melengkapi satu sama lain. Balai TNK menjaga agar kawasan tetap berada dalam prinsip pelestarian lingkungan, perusahaan mendukung dari sisi fasilitas dan kegiatan sosial, sedangkan masyarakat menjadi bagian yang menggerakkan aktivitas sehari-hari di kawasan wisata. Kerja sama ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga Bontang Mangrove Park tetap lestari, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.

Dampak Ekonomi

Pengembangan Bontang Mangrove Park (BMP) yang telah berlangsung sejak tahun 2018 membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam bidang ekonomi. Kehadiran kawasan wisata ini membuka peluang baru di sektor perdagangan dan jasa wisata, seperti usaha kuliner, penyewaan perlengkapan wisata, serta penjualan souvenir. Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja serabutan, kini dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan ekonomi yang tumbuh di sekitar kawasan BMP.

Namun, perjalanan pengembangan BMP tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan data kunjungan yang tercatat hingga tahun 2023, terlihat bahwa

tingkat kunjungan wisatawan mengalami pasang surut yang cukup tajam, terutama saat pandemi COVID-19 melanda. Selama masa pandemi, berbagai kegiatan sosial dibatasi secara ketat oleh pemerintah, termasuk operasional tempat wisata. Hal ini menyebabkan jumlah pengunjung menurun drastis, bahkan pada periode tertentu kawasan ini sempat ditutup total demi mencegah penyebaran virus. Akibatnya, para pelaku usaha kecil di sekitar kawasan BMP kehilangan mata pencaharian mereka dalam waktu yang cukup lama.

Meski begitu, setelah memasuki tahun 2022, kondisi perlahan mulai membaik. Jumlah pengunjung mengalami peningkatan, dan tren pemulihan pariwisata lokal mulai terlihat. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 44.652 wisatawan domestik mengunjungi Bontang Mangrove Park. Angka ini menjadi sinyal positif bahwa minat masyarakat terhadap wisata alam berbasis edukasi dan konservasi mulai tumbuh kembali, meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi.

Peningkatan jumlah pengunjung ini memang memberikan harapan baru bagi pelaku usaha lokal, namun belum sepenuhnya mampu mengembalikan kondisi ekonomi mereka seperti semula. Sebelum pandemi, beberapa pedagang seperti Ibu Dyah dan Ibu Nanik dapat meraup penghasilan yang cukup tinggi, bahkan mencapai 3 hingga 5 juta rupiah per hari saat akhir pekan atau musim liburan. Kini, dengan jumlah pengunjung yang belum stabil, penghasilan mereka menurun drastis. Dalam kondisi normal saat ini, mereka hanya memperoleh sekitar 1 hingga 2 juta rupiah per hari, dan pada hari biasa, pendapatan mereka bisa jauh di bawah itu.

Kondisi ini juga berdampak pada keberlanjutan usaha para pedagang. Sebagian besar dari mereka memilih hanya berjualan pada akhir pekan karena pada hari-hari biasa kawasan wisata sepi pengunjung. Bahkan ada yang memilih untuk menutup usahanya sama sekali karena pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya operasional, seperti biaya tiket masuk, sewa lokasi, kebutuhan kebersihan, dan pembelian bahan dagangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun BMP telah menjadi destinasi yang cukup dikenal, daya beli pengunjung dan volume kunjungan harian belum cukup untuk menghidupi seluruh usaha kecil yang ada di sekitarnya.

Situasi ini memperlihatkan pentingnya dukungan lanjutan dari pemerintah dan pengelola kawasan wisata agar pelaku usaha kecil tetap bisa bertahan. Misalnya dengan memberikan insentif sewa, pelatihan pemasaran digital, promosi kawasan yang lebih luas, atau menyediakan fasilitas usaha yang lebih terjangkau. Dengan cara itu, pemulihan ekonomi lokal bisa berjalan lebih cepat dan merata, serta manfaat dari keberadaan Bontang Mangrove Park benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Dampak Sosial

Secara sosial, kehadiran Bontang Mangrove Park (BMP) telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Sebelum kawasan ini dikelola secara resmi oleh Balai TNK, area tersebut cenderung tidak terawat dan sering dimanfaatkan untuk kegiatan negatif. Banyak laporan menyebutkan bahwa lokasi ini menjadi tempat kumpul remaja yang berujung pada aksi mabuk-mabukan, perkelahian, dan aktivitas lain yang meresahkan warga sekitar. Ketidakjelasan fungsi ruang publik ini menjadikan masyarakat tidak merasa memiliki atau peduli terhadap kawasan tersebut.

Namun, sejak BMP dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis konservasi, suasana dan pola interaksi sosial di lingkungan tersebut mulai berubah secara bertahap. Kawasan ini tidak lagi dipandang sebagai tempat terbengkalai, tetapi menjadi ruang edukatif dan rekreatif yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan. Pemuda dan pemudi setempat kini memiliki wadah untuk berkontribusi secara positif. Mereka dilibatkan dalam berbagai peran, seperti menjadi pemandu wisata, tergabung dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis), atau menjadi bagian dari tim kebersihan dan keamanan kawasan.

Warga seperti Ibu Gusti Ayu mengaku merasakan perubahan besar dalam suasana lingkungan sekitar BMP. Menurutnya, lingkungan kini lebih nyaman, aman, dan tertata, serta menghadirkan rasa bangga terhadap daerah sendiri. Aktivitas masyarakat juga menjadi lebih terarah dan produktif. Banyak keluarga menghabiskan waktu bersama di kawasan BMP, sementara anak-anak muda punya kegiatan yang lebih bermanfaat dibanding sebelumnya.

Perubahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata seperti BMP tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga bisa menjadi alat yang efektif dalam membentuk karakter sosial masyarakat. Terutama bagi generasi muda, keberadaan ruang terbuka yang positif dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, meningkatkan partisipasi sosial, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dampak Ekologis

Dari sisi ekologis, pengelolaan Bontang Mangrove Park juga memberikan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem mangrove yang menjadi identitas utama kawasan ini. Sebelum berada di bawah pengawasan Balai TNK, sebagian besar wilayah mangrove di kawasan tersebut mengalami kerusakan cukup serius. Banyak masyarakat membuka lahan mangrove secara ilegal untuk kepentingan pribadi, dan tidak sedikit pula yang menjadikan area itu sebagai tempat pembuangan sampah.

Situasi ini tentu mengancam keseimbangan ekosistem pesisir dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Namun, setelah kawasan ini ditetapkan sebagai wilayah konservasi dan menjadi objek wisata edukatif, upaya perlindungan dan perbaikan lingkungan mulai dilakukan secara lebih terstruktur. Balai TNK aktif melakukan penanaman kembali pohon mangrove di area yang rusak, melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas warga, serta mengajak pihak swasta dan sekolah untuk turut serta dalam kegiatan rehabilitasi lingkungan.

Selain itu, kegiatan gotong royong sempat menjadi budaya positif yang berkembang di awal-awal pengelolaan kawasan. Masyarakat secara sukarela membersihkan area wisata, menata jalur akses, dan menjaga fasilitas umum. Namun, setelah pandemi COVID-19, semangat gotong royong ini mengalami penurunan. Kini, sebagian besar kegiatan kebersihan dan pemeliharaan kawasan dibantu oleh petugas resmi dari Balai TNK, sementara masyarakat masih aktif menjaga kebersihan di sekitar lapak dagang mereka masing-masing.

Meski semangat partisipasi warga dalam kegiatan kolektif menurun, kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan tetap ada. Banyak warga mulai menyadari bahwa keberlanjutan kawasan BMP sangat bergantung pada perilaku mereka sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun belum kembali seperti masa awal pengelolaan, semangat untuk menjaga kebersihan dan ekosistem mangrove tetap tumbuh, meski dalam skala yang lebih kecil dan terbatas.

Pembahasan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Townsley, para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan dan pengembangan Bontang Mangrove Park (BMP) dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap kelangsungan dan keberhasilan kawasan ini. Dalam konteks BMP, yang termasuk dalam kategori ini adalah Balai Taman Nasional Kutai (Balai TNK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua institusi ini bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pengawasan pelaksanaan di lapangan, serta menjaga fungsi utama kawasan sebagai wilayah konservasi yang dilindungi. Mereka memiliki wewenang formal dan legal dalam menentukan arah pengelolaan kawasan, termasuk menyusun aturan, mengatur zonasi, dan melakukan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat serta wisatawan.

Di sisi lain, stakeholder sekunder mencakup pihak-pihak yang tidak secara langsung memiliki tanggung jawab utama atas pengelolaan kawasan, namun tetap memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan BMP. Kelompok ini terdiri dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Mitra TNK, masyarakat lokal, pelaku usaha kecil, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Peran mereka sangat beragam, mulai dari memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas fisik seperti gazebo, jalan setapak, dan papan informasi, hingga mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove, pelatihan masyarakat, dan penyediaan jasa wisata. Meskipun tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan strategis, kontribusi mereka sangat terasa dalam operasional harian dan keberlanjutan program-program di lapangan.

Hubungan antara stakeholder primer dan sekunder tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung satu sama lain. Pengelolaan kawasan BMP

menjadi lebih menyeluruh dan berkelanjutan karena adanya pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi. Balai TNK dan KLHK memberikan arah dan kebijakan yang menjadi panduan dalam pengelolaan kawasan. Perusahaan-perusahaan mendukung dari sisi finansial dan infrastruktur yang diperlukan agar kawasan ini layak dikunjungi dan nyaman bagi wisatawan. Sementara itu, masyarakat menjadi pelaksana di lapangan, baik sebagai pedagang, pengelola fasilitas, pemandu wisata, hingga penjaga kebersihan kawasan.

Tanpa keberadaan Balai TNK dan KLHK, kawasan ini mungkin tidak akan memiliki arah pengelolaan yang terstruktur dan terkontrol. Tanpa dukungan dari sektor swasta, proses pembangunan fasilitas dan promosi kawasan bisa berjalan lambat. Dan tanpa kehadiran masyarakat, kawasan ini tidak akan memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang dinamis, serta sulit untuk dijaga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keseimbangan peran antar pihak menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan kawasan wisata berbasis konservasi seperti BMP.

Ke depan, upaya untuk meningkatkan kekompakan dan kerja sama antar pemangku kepentingan perlu terus dilakukan. Hal ini penting agar manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis yang telah dirasakan tidak berhenti di masa sekarang saja, tetapi bisa terus dirasakan oleh generasi mendatang. Keterlibatan yang lebih luas dan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Kesimpulan

Pengelolaan dan pengembangan Bontang Mangrove Park (BMP) merupakan contoh nyata dari sinergi antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan kawasan ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, organisasi lingkungan, hingga sektor swasta. Masing-masing stakeholder berperan sesuai dengan kapasitasnya, baik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program edukasi dan konservasi, maupun dalam upaya promosi dan pengembangan fasilitas wisata.

Kehadiran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan menjadi kekuatan tersendiri. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam menjaga kelestarian mangrove dan mengelola potensi wisata yang ada. Partisipasi ini turut mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi berbasis komunitas, seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, jasa pemandu wisata, dan penyewaan perahu. Selain memberi dampak ekonomi secara langsung, keterlibatan ini juga memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan.

Dari sisi ekologis, pengelolaan berbasis konservasi yang diterapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem mangrove serta mendukung kelestarian

flora dan fauna di dalamnya. Kondisi ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim secara lebih luas.

Bontang Mangrove Park memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan wisata berbasis ekologi dapat berhasil bila dilakukan secara inklusif, terarah, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menjadi model yang relevan untuk diterapkan di berbagai wilayah lain yang memiliki potensi serupa, terutama dalam membangun ekowisata yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Dewi, R. S., & Nuraeni, A. (2020). Peran stakeholder dalam pengelolaan taman wisata alam mangrove Angke Kapuk. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 15-22.
- Handayani, I. G. A. K. R., & Riniarti, M. (2019). Analisis peran stakeholder dalam pengembangan ekowisata mangrove di Kota Bontang. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 11(2), 112-120.
- Kusumastanto, T. (2003). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan laut: Studi kasus di Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Pesisir dan Lautan*, 6(1), 43-54.
- Lubis, A., & Siregar, M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove di Desa Lubuk Kertang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 28(2), 75-82.
- Purnomohadi, N. (1996). Pelestarian hutan mangrove untuk perlindungan lingkungan hidup. *Majalah Ilmu Lingkungan*, 1(1), 1-10.
- Puspita, N. L., & Wibowo, C. A. (2021). Strategi pengembangan ekowisata mangrove berbasis masyarakat di Bontang Mangrove Park. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 6(1), 43-55.
- Rahmawati, D., & Cahyani, A. (2018). Pengaruh ekowisata terhadap perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata mangrove. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 88-96.
- Setyowati, E., & Nugroho, H. (2015). Konservasi dan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di pesisir utara Jawa. *Jurnal Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, 2(1), 55-67.
- Sudarmo, S., & Wijayanti, D. (2014). Kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove di Pantai Indah Kapuk. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 33-42.
- Yulianda, F. (2007). Ekowisata bahari: Prinsip dasar dan pengembangannya. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 1(2), 1-8.